



IMBAS KENAIKAN HARGA BBM

Tingkat Hunian Hotel di DIY Turun

YOGYA (MERAPI) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan rata-rata tingkat hunian kamar hotel di provinsi ini mengalami penurunan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Yang biasanya tingkat hunian 60 sampai 70 persen, sekarang baru mencapai 50 persen setelah harga BBM naik," kata Ketua PHRI DIY, Deddy P Eryana, saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis (8/9).

Menurut Deddy, penurunan tingkat hunian hotel paling parah dirasakan hotel bintang dua ke bawah. Meski tidak signifikan, hotel bintang tiga sampai lima masih tertolong meeting, Incentive, convention, exhibition (MICE) dari instansi pemerintah maupun swasta. Penurunan tingkat hunian itu

disebabkan penundaan maupun pembatalan pemesanan kamar hotel dengan persentase mencapai 30 persen. "Pembatalan 30 persen itu banyak ya meskipun lebih rendah dibandingkan saat pandemi," ujarnya dilansir dari Antara.

Naiknya biaya transportasi, menurut dia, memicu para tamu hotel terpaksa menunda atau membatalkan agenda ke Yogyakarta. "Karena biaya transportasinya naik otomatis yang pakai bus, rombongan kecil maupun besar menunda atau membatalkan, karena saat tarif (transportasi) mau dinaikkan mereka tidak mau," ujar dia.

Kondisi itu, membuat para pelaku usaha perhotelan gancang untuk menaikkan tarif layanan di saat daya beli masyarakat sedang menurun. "Ini menjadi dilema bagi kami. Daya beli masyarakat turun, ten-



MERAPI-ANTARA/Lugman Hakim
Ketua PHRI DIY, Deddy P Eryana.

tapi di sisi lain biaya operasional kami naik," kata dia.

Para pelaku usaha hotel anggota PHRI DIY, kata dia, saat ini tengah merumuskan langkah yang tepat untuk meringankan beban operasional.

"Menaikkan tarif dilematis bagi kami, tapi mau tidak mau kalau nanti kiamat berat ya kami sepakati naik dengan konsekuensi menggaet wisatawan dengan pangsa pasar yang selektif," ujar dia.

Di sisi lain, PHRI DIY meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan diskon pajak untuk meringankan beban pelaku usaha hotel dan restoran menghadapi kenaikan harga BBM. "Kenaikan BBM ini harus diimbangi kebijakan pemerintah daerah untuk bisa memberikan diskon pajak, baik itu pajak hotel dan restoran maupun pajak bumi dan bangunan agar beban kami berkurang," ujar Deddy.

Diskon pajak dari pemerintah kabupaten/kota, kata dia, bisa menjadi instrumen untuk membantu perhotelan di DIY bertahan setelah sebelumnya

juga terpuruk akibat pandemi. "Pajak hotel itu bisa dikurangi yang kemarin 10 persen bisa dikurangi menjadi lima persen," kata dia.

Potongan pajak perhotelan, ujar dia, nantinya dapat dihentikan saat kondisi perhotelan sudah stabil. Menurut dia, Pemkab dan Pemkot di DIY dapat mencontoh kebijakan Pemkot Solo yang pernah memberikan kompensasi pajak hotel selama gelaran Solo Great Sale 2019. "Tidak perlu permanen. Ini untuk mancing saja, supaya kita bisa bergerak, untuk memancing wisatawan bisa masuk menginap," ujar dia.

Insentif dari pemerintah, menurut dia, sangat dibutuhkan mengingat hotel dalam kondisi dilematis untuk menaikkan tarif layanan di tengah penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005